

**ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

Theresia Wahyu Retnaningtyas
B 200 120 063

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca Naskah Publikasi dengan judul:

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Yang ditulis oleh:

Theresia Wahyu Retnaningtyas
B 200 120 063

Penandatanganan berpendapat bahwa Naskah Publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 16 Februari 2016

Pembimbing

(Dr. Zulfikar, SE., M.Si)

NIK/NIDN. 823/0615097501

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Triyono, SE., M.Si)

NIK/NIDN. 643/0614086801

ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS UNIT OF WORK OF CITY SURAKARTA

by:
Theresia Wahyu Retnaningtyas

ABSTRACTION

The study aims to analyze the influence of budget participation, clarity targets budget, accounting control, system reporting, decentralisation, and superfision fungsional against accountability of the performance of the financial governments. Based on research result it can be used as material consideration local governments to improve the performance accountability financial goverment agencies.

Testing hypothesis in this research use the analysis regression with test t, test f and the coeficient of the determination (R^2). The population in this study is the employees SKPD city of Surakarta. A sample of the methods use is *multistage sampling*. Based on the criteria has outlined above, then obtained 23 SKPD as a sample.

Based on the result of research is known that : 1) Participation budget not influential on accountability of the performance financial employee of SKPD city of Surakarta, so H_1 rejected. 2) Clarity targets budget influential significant against accountability SKPD financial performance of the city Surakarta, so H_2 accepted. 3) The accounting control not influential on accountability SKPD financial performance of the city Surakarta, so H_3 rejected. 4) The system reporting influential significant against accountability SKPD financial performance of the city Surakarta, so H_4 accepted. 5) decentralisation influential significant against accountability of the performance of the financial employees SKPD Surakarta city, so H_5 accepted. 6) Supervision fungsional influential significant against accountability of the performance of the financial employees SKPD Surakarta city, so H_6 accepted.

Keyword: *Accountability of the performance financial, Budget participation, Clarity targets budget, Accounting control, System reporting, Decentralisation and Supervision financial.*

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA

oleh:
Theresia Wahyu Retnaningtyas

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, desentralisasi dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R^2). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai SKPD Kota Surakarta. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *multistage sampling* Berdasarkan kriteria yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh 23 SKPD sebagai sampel.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai SKPD Kota Surakarta, sehingga H_1 ditolak; 2) kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai SKPD Kota Surakarta, sehingga H_2 diterima; 3) pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai SKPD, sehingga H_3 ditolak; 4) Sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai SKPD Kota Surakarta, sehingga H_4 diterima; 5) Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai SKPD Kota Surakarta, sehingga H_5 diterima; 6) Pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai SKPD Kota Surakarta, sehingga H_6 diterima.

Kata kunci: *Akuntabilitas kinerja keuangan, Partisipasi anggaran, Kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian akuntansi, Sistem pelaporan, Desentralisasi, dan Pengawasan fungsional.*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Halim, 2004). Dalam menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan. Menurut Mahsun dkk (2006), akuntabilitas publik berarti pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihakpihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak sebagai pelaku pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar informasinya. Selain itu, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Wulandari, 2013). Berhasil atau tidaknya suatu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik. Secara umum, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan. Sehingga dalam hal ini akuntabilitas publik sangat penting untuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

Partisipasi memberikan dampak positif terhadap perilaku karyawan, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dan meningkatkan kerjasama diantara para manajer. Bentuk keterlibatan bawahan/pelaksana anggaran disini dapat bervariasi, tidak sama satu organisasi dengan yang lain. Tidak ada pandangan yang seragam mengenai siapa saja yang harus turut berpartisipasi,

seberapa dalam mereka terlibat dalam pengambilan keputusan dan beberapa masalah menyangkut partisipasi (Siegel dan Ramana uskas-Marconi, 2009)

Anggaran menjadi sangat penting dan relevan di pemerintahan daerah, karena anggaran berdampak terhadap kinerja pemerintahan yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Anggaran merupakan dokumen atau kontrak politik antarpemerintah dan DPRD sebagai wakil rakyat, untuk masa yang akan datang (Mardiasmo, 2009) Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, secara tidak langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat. Salah satu penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran (Chici, 2013) dalam Yuliyanti, Hardi, dan Rusli (2014).

Pengendalian merupakan suatu proses melalui mana manajemen suatu organisasi membuat keyakinan yang beralasan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai misi dan rencana organisasi, pelaporan keuangan andal, dan kebijakan, hukum, dan peraturan yang relevan diikuti. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata dapat dilakukan apabila dilakukan pengendalian manajemen yang baik. Salah satu jenis pengendalian manajemen adalah pengendalian keuangan (*financial control*) dengan memanfaatkan sistem akuntansi (Darma, 2004) dalam Yuliyanti, Hardi, dan Rusli (2014).

Untuk memantau dan mengendalikan kinerja atasan dalam Fenomena yang terjadi dalam perkembangan akuntabilitas sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Dalam keberhasilan akuntabilitas pada sektor sektor publik dibutuhkan suatu kejelasan sasaran dan tujuan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi

sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggung-jawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan pengawasan terhadap organisasi sektor publik tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya pengawasan yang baik maka akan dihasilkan suatu pelaporan yang baik pula. Hal ini meningkatkan motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerjanya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat publik.,

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Mei Anjarwati (2012) dengan judul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perbedaan lain terdapat pada populasi yang digunakan. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kota Surakarta. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mei Anjarwati yang melakukan penelitian pada SKPD di Tegal dan Pemalang.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada SKPD dikarenakan kegiatan badan dan dinas secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat dan juga merupakan satuan kerja pemerintah yang menyusun, menggunakan, dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksana anggaran dari pemerintah daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Akuntabilitas Kinerja Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (BPKP, 2011). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung-jawaban secara periodik (BPKP, 2011).

Menurut Halim (2004) menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan akuntabilitas kinerja, pemerintah daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggung-jawaban atas aktivitas dan kinerja finansial kepada stakeholdernya. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu menjelaskan segala pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian target-target APBD dan kinerja keuangan (*financial performance*) secara terbuka, dapat dimengerti oleh masyarakat dan stakeholder lainnya.

2. Partisipasi Anggaran

Anggaran merupakan rencana jangka pendek (biasanya satu tahun) perusahaan untuk melaksanakan sebagian rencana jangka panjang yang berisi langkah strategi untuk mewujudkan strategi objektif tertentu beserta taksiran sumber daya yang diperlukan. Nafirin (2010) mengemukakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang disahkan. Menurut Brownell (2012), partisipasi anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran, sementara Chong (2012) menyatakan sebagai proses dimana bawahan/pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dalam dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Kesempatan yang diberikan diyakini meningkatkan pengendalian dan rasa keterlibatan dikalangan bawahan/pelaksana anggaran. Partisipasi manajer dalam proses penganggaran mengarah kepada seberapa besar tingkat keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran (Kenis, 2009).

3. Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran pemerintah merupakan salah satu cara implementasi akuntansi manajemen yang menjadi alat penting dalam melakukan alokasi sumber daya di pemerintah. Menurut Freeman (2003) dalam Susilowati (2014) anggaran adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resourcesto unlimited demands*) mengungkapkan peran strategis anggaran dalam kekayaan sebuah organisasi politik

Mardiasmo (2009) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Baswir (2000) dalam Darwanis dan Chairunnisa (2013) menyatakan bahwa anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode di masa yang akan datang. Sedangkan anggaran negara adalah gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi baik kebijaksanaan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode di masa depan maupun kebijaksanaan penerimaan pemerintah untuk menutupi pengeluaran tersebut.

4. Pengendalian Akuntansi

Menurut Anthony (2005) dalam Yuianti, Hardi dan Rusli (2014) pengendalian adalah suatu perangkat yang mengukur dan menilai apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dilakukan, sedangkan pengendalian akuntansi pada suatu organisasi adalah untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas finansial dari aktivitas-aktivitas organisasi.

Menurut Indaswari (2010) sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa aspek anak sistem yang saling berkaitan yaitu: pemograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban untuk mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu

secara efektif dan efisien. Menurut Mardiasmo (2009) mengungkapkan fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Selain itu., dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan (*financial control*) dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi (*organization control*).

5. Sistem Pelaporan

Terdapat tiga tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu akuntabilitas, manajerial, dan transparansi. Akuntabilitas diartikan sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. Manajerial berarti menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, utang, dan ekuitas dana. Kusumaningrum (2010).

6. Desentralisasi

Desentralisasi adalah proses penentuan kegiatan, penentuan nilai, penentuan orang yang bertanggung jawab atas program dan kegiatan, menentukan prioritas program dan kegiatan. Organisasi desentralisasi secara umum ditujukan dengan pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam sentralisasi yang baik, sebagian keputusan diambil pada tingkat hirarki organisasi yang tertinggi, dan apabila sebagian otorisasi didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi, maka organisasi tersebut lebih desentralisasi.

7. Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah (Wasistiono, 2010). Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan

tujuan agar pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deddy dan Sherly (2010) dalam Wulandari (2009) menyatakan bahwa pengawasan fungsional akan menunjang akuntabilitas publik. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Sehingga dengan dilaksanakannya pengawasan fungsional yang memadai akan menunjang akuntabilitas publik.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data Primer berupa jawaban kuesioner yang disebarkan peneliti ke Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Surakarta. Teknik pengambilan sampel untuk penelitian ini adalah menggunakan *multistage sampling*. Penggunaan metode ini karena ketidakmungkinan untuk menjangkau populasi yang luas dan biaya yang tinggi.

Aparat pemerintah yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pejabat struktural SKPD yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan dan pengusulan anggaran serta pelaksanaan anggaran. Focus responden penelitian ini adalah pejabat eselon III dan IV (Kepala bidang dan Kepala subbagian/ seksi/ subbidang) dikarenakan rata-rata pejabat terkait adalah pejabat level tengah dan bawah yang bertanggungjawab pada penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran pada setiap unit kerjanya pada SKPD.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai struktural SKPD yang terlibat pada proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran di pemerintah kota Surakarta. Penelitian dilakukan pada SKPD karena kegiatan badan dan dinas secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat dan juga merupakan satuan kerja pemerintah yang menyusun, menggunakan dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksana anggaran dari pemerintah daerah. Berdasarkan kriteria yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh 23

SKPD sebagai sampel. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN

Berhasil atau tidaknya suatu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik. Secara umum, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan. Sehingga dalam hal ini akuntabilitas publik sangat penting untuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

Berdasarkan hasil perhitungan untuk pengaruh partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,338 dengan $p=0,737$. Oleh karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,338 < 2,002$) dan probabilitas $0,737 > 0,05$; maka H_1 ditolak, yang berarti bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta.

Menurut Brownell (2012), partisipasi anggaran adalah tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran, sementara Chong (2012) menyatakan sebagai proses dimana bawahan/ pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dalam dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Kesempatan yang diberikan diyakini meningkatkan pengendalian dan rasa keterlibatan dikalangan bawahan/pelaksana anggaran. Partisipasi manajer dalam proses penganggaran

mengarah kepada seberapa besar tingkat keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran (Kenis, 2009).

Partisipasi memberikan dampak positif terhadap perilaku karyawan, meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dan meningkatkan kerjasama diantara para manajer. Betapa pun demikian, Bentuk keterlibatan bawahan/pelaksana anggaran disini dapat bervariasi, tidak sama satu organisasi dengan yang lain. Tidak ada pandangan yang seragam mengenai siapa saja yang harus turut berpartisipasi, seberapa dalam mereka terlibat dalam pengambilan keputusan dan beberapa masalah menyangkut partisipasi (Siegel dan Ramanauskas-Marconi, 2009).

2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

Berdasarkan hasil perhitungan untuk pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,413 dengan $p = 0,019$. Oleh karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,413 > 2,002$) dan probabilitas $0,019 < 0,05$; maka H_2 diterima, yang berarti bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta.

Menurut Budi (2006) dalam Suwandi (2013) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran itu dipahami oleh orang yang bertanggungjawab atas anggaran tersebut. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam rencana strategik daerah (Renstrada) dan program pembangunan daerah (Propeda). Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Putra (2013) dalam Primayoni, Adiputra, dan Sujana (2014) menyatakan terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Penelitian sebelumnya telah

membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat akuntabilitas, seperti yang telah diungkapkan terhadap tingkat akuntabilitas, seperti yang diungkapkan dalam penelitian terdahulu oleh Anjarwati (2012), yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Tegal dan Pemalang. Yuliyanti, Hardi, dan Rusli (2014) yaitu variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Palawan. Primayoni, Adiputra, dan Sujana (2014) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

Berdasarkan hasil perhitungan untuk pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0,690 dengan $p=0,493$. Oleh karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,690 < 2,002$) dan probabilitas $0,493 > 0,05$; maka H_3 ditolak, yang berarti bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta.

Pengendalian merupakan suatu proses melalui mana manajemen suatu organisasi membuat keyakinan yang beralasan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai misi dan rencana organisasi, pelaporan keuangan andal, dan kebijakan, hukum, dan peraturan yang relevan diikuti. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata dapat dilakukan apabila dilakukan pengendalian manajemen yang baik. Salah satu jenis pengendalian manajemen adalah pengendalian keuangan (*financial control*) dengan memanfaatkan sistem akuntansi (Darma, 2004) dalam Yuliyanti, Hardi, dan Rusli (2014).

Dalam penelitian Indraswari (2010) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun demikian, penelitian Mei Anjarwati (2012) dan Netty

(2011) mengatakan bahwa pengendalian akuntansi juga tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

Berdasarkan hasil perhitungan untuk pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,065 dengan $p=0,043$. Oleh karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,065 > 2,002$) dan probabilitas $0,043 < 0,05$; maka berarti H_4 diterima, yang berarti bahwa sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000) dalam Kusumaningrum (2010) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan.

5. Pengaruh Desentralisasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

Berdasarkan hasil perhitungan untuk pengaruh desentralisasi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,183 dengan $p=0,033$. Oleh karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,183 > 2,002$) dan probabilitas

$0,033 < 0,05$; maka ini menunjukkan H_5 diterima, yang berarti bahwa desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta.

Desentralisasi adalah proses penentuan kegiatan, penentuan nilai, penentuan orang yang bertanggung jawab atas program dan kegiatan, menentukan prioritas program dan kegiatan. Organisasi desentralisasi secara umum ditujukan dengan pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam sentralisasi yang baik, sebagian keputusan diambil pada tingkat hirarki organisasi yang tertinggi, dan apabila sebagian otorisasi didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi, maka organisasi tersebut lebih desentralisasi.

Penelitian dari Bangun (2009) tentang Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai variabel pemoderasi (Studi Pada Pada Pemerintah Deli Serdang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD.

6. Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

Berdasarkan hasil perhitungan untuk pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,276 dengan $p=0,027$. Oleh karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,276 > 2,002$) dan probabilitas $0,027 < 0,05$; maka H_6 diterima, yang berarti bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta.

Akuntabilitas publik dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan pengawasan fungsional yang efektif. Pada pemerintah daerah terdapat aparat pengawasan fungsional intern pemerintah kabupaten atau kota yang membantu pimpinan pemerintah dalam melakukan pengawasan apakah kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya sesuai dengan visi, misi, tujuan,

sasaran dan program yang ditentukan. Tujuan dari akuntabilitas itu sendiri adalah untuk memberikan dan menyajikan beberapa informasi yang diperlukan dan dimengerti oleh pihak yang berkepentingan terutama masyarakat. Pelaporan kinerja disini meliputi bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pegawai sektor publik berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Wulandari (2009) menguji tentang pengaruh pengawasan fungsional dalam menunjang akuntabilitas publik pada pemerintahan kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik yang artinya bahwa semakin baik pengawasan fungsional maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta diperoleh nilai koefisien regresi (b_1) sebesar 0,052 dengan parameter positif; hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan partisipasi anggaran, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan pegawai SKPD Kota Surakarta sebesar 0,052 dengan asumsi variabel yang lain konstan, namun partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sehingga H_1 ditolak.
2. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta diperoleh nilai koefisien regresi (b_2) sebesar 0,466 dengan parameter positif; hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan kejelasan sasaran anggaran, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan pegawai SKPD Kota Surakarta sebesar 0,466 dengan asumsi variabel yang lain konstan. Kejelasan

sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sehingga H_2 diterima.

3. Pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta diperoleh nilai koefisien regresi (b_3) sebesar 0,143 yang berparameter positif; hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan pengendalian akuntansi, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan pegawai SKPD Kota Surakarta sebesar 0,143 dengan asumsi variabel yang lain konstan, namun pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sehingga H_3 ditolak.
4. Pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta diperoleh nilai koefisien regresi (b_4) sebesar 0,634 yang berparameter positif; hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan sistem pelaporan, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan pegawai SKPD Kota Surakarta sebesar 0,634 dengan asumsi variabel yang lain konstan. Sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sehingga H_4 diterima.
5. Pengaruh desentralisasi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta diperoleh nilai koefisien regresi (b_5) sebesar 0,275; hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan desentralisasi, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan pegawai SKPD Kota Suarkarta sebesar 0,275 dengan asumsi variabel yang lain konstan. Desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sehingga H_5 diterima.
6. Pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surakarta diperoleh nilai koefisien regresi (b_6) sebesar 0,241 yang berparameter positif; hal ini

menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan pengawasan fungsional, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan pegawai SKPD Kota Suarkarta sebesar 0,241 dengan asumsi variabel yang lain konsntan. Pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sehingga H_6 diterima.

Berdasarkan pada keterbatasan dan saran di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini seharusnya dilakukan dengan wawancara secara langsung sehingga penulis dapat memantau responden dalam menjawab instrumen penelitian.
2. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja keuangan dengan mempertimbangkan pada faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, Dwi Permadi. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemda terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Bandung.
- Anjarwati, M. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. AAJ 1 (2) (2012). Universitas Semarang: Semarang.
- Argyris, Chris. 2012. *On Organizational Learning*, Second edition. Malden: Blackwell.
- Arikunto S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI., Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.

- Bangun, Andarias. 2009. *Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)*. Tesis. Universitas Sumatra Utara.
- BPKP. 2011, *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi Keenam. Bogor: Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengawasan BPKP.
- Brownell.L.E. and Young. E.H., 2012, *Process Equipment Design 3ed*, John Wiley & Sons, New York.
- Cahyani, Utama. 2015, *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10.3 (2015).
- Chong, V.K. and Chong, K.M. 2012. *Budget goal commitment and informational effects of budget participation on performance: a structural equation modeling approach*, *Behavioral Research in Accounting*, Vol. 14, pp. 65-86.
- Cherrington, D.J. 2003. *Organizational behavior (2nd ed.)*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Darwanis, Chairunnisa. 2013, *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 6 No. 2 Juli 2013.
- Djarwanto dan Pangestu Subagyo. 2005. *Statistik Induktif*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar* : Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Haspiarti. 2012. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektifitas Pengendalian Keuangan*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No. 2.
- Indraswari, R. 2010. *Pengaruh Status International, Diversifikasi Operasi dan Legal Origin Terhadap Manajemen Laba (Studi Perusahaan Asia Yang Terdaftar di NYSE)*. *Jurnal SNA*.
- Indriantoro, dan Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.

- Kenis, I. 2009. *Effects on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance*. The Accounting Review LIV (4). 707-721.
- Kusumaningrum, Indraswari. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi UNDIP.
- Mahsun, Mohamad, Firma. S, dan Heribertus. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Ed 1. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Mardiasmo. 2009. *Serial Otonomi Daerah: Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Maryanti, Elda Sofia. 2013. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*. Universitas Negeri Padang. Sumatera Barat.
- Milani, K.R. 2005. *The relationship of participation in budget setting to industrial supervisor performance and attitude*, The Accounting Review, Vol. 50 No. 2, pp. 274-84.
- Merchant, Kenneth A. 2011). Edisi 13. *Accounting: Text and Cases*. Singapore : McGraw-Hill.
- Nafirin, M. 2010. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Netty, Herawati. 2011. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*. Seri Humaniora, Jurnal. Volume 13, Nomor 2, Hal. 31-36. Mendalo Darat: Jambi.
- Nuraini. 2012, *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes*. Jurnal. Universitas Semarang.
- Primayoni. Ni Kadek Rina, Adiputra, Sujana. 2014. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014).
- Rangkuti, Lusi Elviani. 2013. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Kepuasan Kerja melalui Prestasi Kerja Aparat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Siegel, G dan H. R. Marconi Boulion. 2009. *Behavioral Accounting*. Cincinnati. Ohio. South-Western Publishing Co.

- Setiaji, Bambang. 2006. *Panduan Riset Dengan Pendekatan Kuantitatif*. Surakarta: UMS Press.
- Susilowati, Harini. 2014. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Motivasi Kerja terhadap Akuntabilitas Kinerja keuangan pemerintah daerah*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suwandi, Annisa Pratiwi. 2013. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi Terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah, Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Padang*. Jurnal. Universitas Negeri Padang <http://www.google.com/Fejournal.unp.ac.id>
- Tarigan, Josua. 2011. *Kepemilikan Manajeral : Kebijakan Hutang, Kinerja dan Nilai Perusahaan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 1, Mei 2011, Hal: 1-8.
- Wasistiono, Sadu. 2010. *Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan*. Jurnal Ilmu Politik AIPI, Nomor 21 tahun 2010 dengan tema “Dasawarsa Kedua Otonomi Daerah : Evaluasi dan Prospek”, Jakarta.
- Wulandari, Indah. 2013. *Pengaruh Pengawasan Fungsional dalam menunjang Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kota Padang*. Artikel. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Yulianti, Reni, Hardi dan Rusli. 2014. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. JOM FEKON Vol.1 No. 2 Oktober 2014.